

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dapat diambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Ukuran dan tujuan peneliti menilai bahwa berdasarkan Tujuan yaitu kesesuaian Kebijakan (Program) Pemerintah Kecamatan Mandalajati sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dimana kecamatan mandalajati menggunakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah, Penggunaan ini mempermudah dimana bisa mengetahui Jumlah sampah yang telah dipilah dan bernilai ekonomi. Namun kebijakan ini masih kurang intensif dalam penyampaian aturan kebijakan kepada warga masyarakat. hal ini berdasarkan observasi peneliti ke lapangan dimana beberapa wilayah warga masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini. Sedangkan untuk Ukuran yaitu Ketetapan sasaran peneliti menilai bahwa masih kurang dalam Implementasi kebijakan ini karena belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini karena dari proses sosialisasi edukasi yang kurang dan beberapa masyarakat di beberapa kewilayahan yang belum memahami Teknologi Informasi seperti aplikasi maupun website yang dibuat oleh

pemerintah kecamatan mandalajati. Sehingga diperlukan pembuatan kebijakan yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.

2. Sumber daya peneliti menilai bahwa mengalami kekurangan pada sumber daya manusia dan Sumber Daya Anggaran, untuk sumber daya manusia ini peneliti melihat sumber daya manusia kurang dalam sebuah kebijakan, dikarenakan Tidak adanya relawan dari warga yang bersedia mengurus bank sampah, tidak ada nya honor dan tidak adanya sosialisasi secara berkala oleh Dinas terkait hal ini membuat beberapa bank sampah tidak aktif dikarenakan terjadinya kendala tersebut mengalami ketidaksesuaian keahlian pada masing-masing individu dan tidak adanya sumber daya manusia yang berjiwa sosial. Anggaran kebijakan Kang Pisman tidak memiliki sumber anggaran dalam kebijakan ini membuat kinerja Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi kang pisman sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya dikarenakan anggaran itu membantu untuk mengakomodasi segala kegiatan bank sampah. Sumber daya kebijakan suatu komponen yang penting sebagai dasar patokan keberhasilan kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya. jika salah satu sumber daya tidak berjalan maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam pelaksanaannya.
3. Komunikasi antar organisasi peneliti menilai Transmisi kejelasan dan konsistensi berjalan kurang maksimal dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Hal ini dilihat dari hanya beberapa aparatur kewilayahan

melakukan penyampaian kebijakan ini kepada warga masyarakatnya dan aparaturnya dibawahnya yang hanya beberapa yang peduli akan kebijakan ini

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana peneliti menilai bahwa pendidikan cukup bagus dan dalam hal kejujuran aparaturnya dan petugas bank sampah sudah melakukan di dalam melaksanakan kebijakan.
5. Sikap Para Pelaksana peneliti menilai bahwa dalam indikator ini yaitu kognisi (pemahaman) para aparaturnya, tanggapan dan Intensitas dalam memahami isi kebijakan masih ada beberapa kekurangan, hal itu dilihat dari beberapa kewilayahannya sudah menjalankannya dan ada beberapa kewilayahannya yang masih belum ada pergerakan.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik peneliti menilai beberapa sub indikator ini yaitu sumber daya ekonomi dan Kekuasaan, Sumber daya ekonomi yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan kebijakan sangatlah kurang. Hal ini disebabkan tidak dianggarkannya anggaran untuk kebijakan yang berfokus pada masalah lingkungan. Selanjutnya, Indikator Kekuasaan yaitu kewenangan pejabat aparaturnya dinilai masih kurang dikarenakan dalam kekuasaannya hanya sebatas perintah saja dan sedikit turun ke lapangan untuk menanyakan kepada petugas yang ada di lapangan, hal tersebut Terkait permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan itu masih menjadi kekurangan yang ada di pejabat aparaturnya.

1.2 Saran

1. Kecamatan Mandalajati dalam Ketetapan sasaran Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) mengalami ketidaktepatan sasaran dalam sebuah kebijakan, Hal ini diperlukan pembuatan kebijakan Bank sampah digital yang dilakukan oleh camat sebagai pimpinan kecamatan Mandalajati membuat kebijakan yang operasional yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.
2. Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang meliputi aparatur kecamatan Mandalajati, aparatur kelurahan Pasir Impun, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Jatihandap dan Kelurahan Sindang jaya, Karang Taruna Kecamatan mandalajati, Bank Sampah Indonesia selama ini menjadi pondasi mengalami kekurangan dan ketidaksesuaian keahlian pada masing-masing individu, Hal ini diperlukan pelatihan dan edukasi lebih lagi agar sumber daya manusia dapat memahami dan dapat menjalankan aplikasi. Untuk Sumber Daya anggaran dalam kebijakan Kang Pisman Mobile ini agar diperhatikan dan disesuaikan anggarannya agar dapat membiayai segala keperluan Kebijakan Aplikasi Kang Pisman Mobile.
3. Komunikasi Antar Organisasi dalam Impelementasi kebijakan *E-Government* Kang Pisman Mobile harus ada penyalarsan dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Mandalajati ke

Kelurahan Pasir Impun, Karang Pamulang, Jatihandap dan Sindang jaya serta dari Kelurahan ke Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di empat kelurahan agar kebijakan tidak ada perubahan dan mekanisme pada kebijakan aplikasi ini dapat berjalan.

4. Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Kang Pisman Mobile yaitu kognisi (pemahaman) para aparatur, tanggapan dan Intensitas harus lebih dipahami lagi isi kebijakan aplikasi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam pemahaman dan pengimplementasian dari pimpinan kecamatan Mandalajati maupun aparatur kecamatan Mandalajati dan Aparatur kelurahan. Hal ini diperlukan komunikasi dan edukasi kepada aparatur kewilayahan dan masyarakat sebagai objek Implementasi Kebijakan ini.
5. Kondisi Ekonomi, yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan saat ini masih kurang ini perlu ada komitmen anggaran oleh Pemerintah Kota Bandung yang harus diperhatikan pasalnya anggaran ini sangat penting untuk membiayai segala kebutuhan yang ada di dalam kebijakan ini. Sedangkan untuk kondisi politik yaitu kekuasaan lebih diperhatikan kewenangan pejabat aparatur harus seimbang dalam memberikan arahan dan melakukan pemantauan ke lapangan, hal ini perlu dilakukan agar tercapainya tujuan yang ada didalam Implementasi Kebijakan aplikasi Kang Pisman Mobile.